

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Gotong Royong

2.1.1. Pengertian Gotong Royong

Kata gotong royong dalam masyarakat terlihat hidup dalam mata pencaharian sebagai petani tradisional. Ketika petani menggarap tanah, mereka memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk mencangkul tanah, menanam benih, mengatur saluran air, memupuk tanaman dan menyiangi tanaman. Demikian juga pada saat musim panen tiba. Warga masyarakat bergotong royong memetik padi, mengeringkannya, dan memasukkannya ke dalam lumbung (Abdillah, 2011).

Gotong royong berasal dari kata dalam Bahasa Jawa, atau setidaknya mempunyai nuansa Bahasa Jawa. Kata gotong dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat, sebagai contoh ada pohon yang besar roboh menghalangi jalan di suatu desa. Masyarakat mengangkatnya bersama-sama untuk memindahkan kayu itu ke pinggir jalan. Orang desa menyebutnya dengan *nggotong* atau *menggotong* (Abdillah, 2011).

Kata royong dapat dipadankan dengan bersama-sama. Dalam bahasa Jawa kata *saiyeg saeko proyo* atau satu gerak satu kesatuan usaha memiliki makna yang amat dekat untuk melukiskan kata royong ini. Ibarat burung kuntul berwarna putih terbang bersama-sama, dengan kepak sayapnya yang seirama,

menuju satu arah bersama-sama, dan orang kemudian menyebutnya dengan *holopis kuntul baris* (Abdillah, 2011).

Adapun demikian gotong royong memiliki pengertian bahwa setiap individu dalam kondisi seperti apapun harus ada kemauan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap obyek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak disekeliling hidupnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, ketrampilan atau *skill*, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan (Abdillah, 2011).

Bagi mereka yang masih belum mampu melakukan salah satu dari alternatif bantuan diatas, maka mereka cukup dengan berdiam diri dan tidak berbuat apapun yang bisa merusak situasi dan kondisi yang berlaku saat itu. Berdiam diri dan tidak membuat keruh situasipun sudah merupakan implementasi gotong royong yang paling minimal (Abdillah, 2011).

2.1.2. Jenis-Jenis Gotong Royong

Sistem tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat desa yang di dalam bahasa Indonesia disebut sistem gotong royong, menunjukkan perbedaan-perbedaan mengenai sifat lebih atau kurang rela dalam hubungan dengan beberapa macam lapangan aktivitas lapangan sosial. Berhubungan dengan hal tersebut dapat dibedakan adanya beberapa macam tolong-menolong, ialah misalnya:

1. Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian.

2. Tolong-menolong dalam aktivitas-aktivitas sekitar rumah tangga.
3. Tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara.
4. Tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana dan kematian

(Koentjaraningrat, 1985:168).

Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, orang bisa mengalami musim-musim sibuk ketika masa bercocok tanam. dalam musim-musim sibuk itu kalau tenaga keluarga batih atau keluarga luas tidak cukup lagi untuk menyelesaikan sendiri segala pekerjaan di ladang atau di sawah, maka orang bisa menyewa tenaga tambahan atau bisa meminta bantuan tenaga dari sesama warga komunitasnya. Sistem ini bersifat *universal* dalam semua masyarakat di dunia yang berbentuk komunitas kecil, kompensasi untuk jasa yang disumbangkan itu bukan upah melainkan tenaga bantuan juga (Koentjaraningrat, 1985:168).

Pada aktivitas-aktivitas sekitar rumah tangga, ialah kalau misalnya orang memperbaiki atap rumahnya, mengganti dinding rumah, membersihkan rumah dari tikus, menggali sumur di pekarangan. Pada masyarakat desa, warga sering meminta pertolongan dari tetangganya, dengan begitu seorang individu harus memperhatikan segala peraturan sopan santun dan adat istiadat yang biasanya bersangkutan paut dengan aktivitas serupa. Adapun sikap tuan rumah juga menjamu para warga yang sudah membantu dengan menyajikan makanan, di samping kewajiban untuk membalas jasa kepada semua tetangga yang datang tersebut pada saat mereka masing-masing memerlukan tenaga bantuan dalam aktivitas sekitar rumah tangga mereka. Sifat kompleks dari sistem tolong-

menolong dalam sektor rumah tangga sering mengurangi rasa kesadaran dari dalam diri seorang warga (Koentjaraningrat, 1985:167).

Adapun tolong-menolong dalam aktivitas mempersiapkan pesta dan upacara biasanya berjalan dengan rasa kesadaran diri yang besar, karena warga yang ikut membantu dapat langsung menikmati makanan enak di acara pesta, merayakan pesta dan ikut merasakan suasana gembira. Pada sikap tolong-menolong pada peristiwa-peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian, biasanya dilakukan oleh seseorang dengan amat rela, tanpa perhitungan akan mendapat pertolongan kembali, karena menolong orang yang mendapat kecelakaan didasari oleh rasa belasungkawa yang *universal* dalam jiwa makhluk manusia (Koentjaraningrat, 1985:167).

2.1.3. Konsep Resiprositas (Timbal Balik) dalam Gotong Royong

Terjadinya sebuah resiprositas dalam sebuah komunitas kecil, contoh masyarakat di desa disebabkan adanya hubungan simetris antar kelompok atau antar individu. Hubungan simetris ini adalah hubungan sosial dengan masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama ketika proses pertukaran berlangsung, contohnya adalah dalam waktu yang sama dan di sebuah lingkungan yang sama terdapat dua orang yang mengadakan selamatan, namun salah satunya punya kedudukan lebih tinggi dalam stratifikasi sosial di masyarakat. Adapun dalam aktivitas tersebut mereka tidak menempatkan diri pada kedudukan sosial yang berbeda. Mereka sejajar sebagai warga kelompok keagamaan, meskipun sebagai warga desa

mereka mempunyai derajat kekayaan dan prestise sosial yang berbeda-beda. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya posisi sosial yang sama, pada suatu saat menjadi pengundang dan yang diundang (Pandupitoyo, 2010).

Karakteristik lain yang menjadi syarat sekelompok individu atau beberapa kelompok dapat melakukan aktivitas resiprositas adalah adanya hubungan personel diantara mereka. Pola hubungan ini terutama terjadi di dalam komunitas kecil dimana anggota-anggotanya menempati lapangan hidup yang sama. Dalam komunitas kecil itu kontrol sosial sangat kuat dan hubungan sosial yang intensif mendorong orang untuk berbuat untuk mematuhi adat kebiasaan. Sebaliknya, hubungan impersonal tidak bisa menjamin berlakunya resiprositas karena interksi antar pelaku kerjasama resiprositas sangat rendah sehingga pengingkaran pun semakin mudah muncul (Pandupitoyo, 2010).

Proses pertukaran resiprositas lebih panjang daripada jual beli. Proses jual beli biasanya terjadi dalam waktu yang sangat pendek, misalnya jual beli barang di pasar. Kalau pembeli telah menawar barang dan mampu membayar kontan, maka kalau barang telah dibayar berarti proses jual beli tersebut berakhir. Proses pertukaran resiprositas ada yang relatif pendek, namun juga ada yang panjang. Adapun dikatakan pendek, kalau proses tukar menukar barang atau jasa dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, misalnya tolong menolong antar petani dalam mengerjakan tanah. Tolong menolong ini dapat berlangsung hanya dalam satu musim tanam, dan kalau kedua belah pihak telah memberikan bantuan dan menerima kembali bantuan yang diberikan, maka proses resiprositas tersebut dapat dikatakan telah berakhir (Pandupitoyo, 2010).

Proses resiprositas yang panjang jangka waktunya sampai lebih dari satu tahun, misalnya sumbang-menyumbang dalam peristiwa perkawinan. Tidak setiap rumah tangga yang membudayakan tradisi sumbang menyumbang. Dalam kenyataannya, proses resiprositas dapat berlangsung sepanjang hidup seorang individu dalam masyarakat, bahkan mungkin sampai diteruskan oleh anak keturunannya. Seorang petani, misalnya, sejak kecil dia mewakili orang tuanya ikut gotong-royong dengan tetangganya serta keturunannya mereka. Situasi seperti ini dapat terjadi karena komunitas tempat hidup petani tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebersamaan (Pandupitoyo, 2010).

Pentingnya syarat adanya hubungan personal bagi aktivitas resiprositas adalah berkaitan dengan motif-motif dari orang melakukan resiprositas. Motif tersebut adalah harapan untuk mendapatkan prestise sosial seperti, misalnya: penghargaan, kemuliaan, kewibawaan, popularitas, sanjungan, dan berkah. Motif tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama resiprositas, tetapi juga lingkungan dimana mereka berada (Pandupitoyo, 2010).

Keberadaan resiprositas juga ditunjang oleh struktur masyarakat yang egaliter yaitu suatu masyarakat yang ditandai oleh rendahnya tingkat stratifikasi sosial, sedangkan kekuasaan politik relatif terdistribusi merata dikalangan warganya. Struktur masyarakat yang egaliter ini memberikan kemudahan bagi warganya untuk menempatkan diri dalam kategori sosial yang sama ketika mengadakan kontak resiprositas (Pandupitoyo, 2010).

Menurut Sahlins (1974) dalam Pandupitoyo (2010), ada tiga macam resiprositas umum, resiprositas sebanding, dan resiprositas negatif. Resiprositas yang terakhir ini sebenarnya kata lain dari pertukaran pasar atau jual beli dan lebih tepat dibicarakan diluar kesempatan ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa jenis-jenis resiprositas tersebut berhubungan dengan pola-pola organisasi sosial, ukuran kekayaan, dan tipe barang yang dipertukarkan (Pandupitoyo, 2010).

Dalam resiprositas umum tersebut tidak ada hukum –hukum yang dengan ketat mengontrol seseorang untuk memberi atau mengembalikan. Hanya moral saja yang mengontrol dan mendorong pribadi-pribadi untuk menerima resiprositas umum sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Orang yang melanggar kerjasama resiprositas ini bisa mendapat tekanan moral dari “masyarakat” atau “kelompok” yang mungkin berupa umpatan, peringatan lisan, atau gunjingan yang dapat menurunkan martabat dalam pergaulan di masyarakat atau kelompoknya (Pandupitoyo, 2010).

Sistem resiprositas umum dapat menjamin individu-individu terpenuhi kebutuhannya pada waktu mereka tidak mampu ”membayar” atau mengembalikan atas apa yang mereka terima dan pakai. Sejak lahir manusia telah tergantung dari orang lain, misal ibunya. Manusia membutuhkan teman untuk berbagi rasa dalam memecahkan masalah hidup dan menikmati kebahagiaan (Pandupitoyo, 2010).

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat industri yang relatif baik membuat corak resiprositas umum menjauh dari fungsi pemenuhan kebutuhan pokok.

Masyarakat nampaknya menempatkan resiprositas ini sebagai sarana maupun produk dan simbol dari hubungan kesetiakawanan atau cinta kasih. Bentuk resiprositas yang cocok untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah resiprositas simbolik (Pandupitoyo, 2010).

Resiprositas simbolik sebagai salah satu bentuk resiprositas umum merupakan suatu adat kebiasaan memberi dan menerima sebagai sarana untuk menjalin hubungan persahabatan semata, tanpa mempunyai makna yang dekat dengan usaha memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam masyarakat sederhana, resiprositas umum cenderung memusat dikalangan orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat. Dalam masyarakat desa agraris, meskipun struktur keluarga yang berlaku misalnya keluarga kecil, namun resiprositas di kalangan keluarga dekat nampak lebih kuat dibanding masyarakat kota (Pandupitoyo, 2010).

Golongan masyarakat yang nafkahnya dekat dengan batas substansi seringkali melembagakan resiprositas umum sebagai mekanisme untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam masyarakat ini, orang memberi nilai tinggi terhadap teman dan kerabat. Saling memberi hasil buruan merupakan kebiasaan yang lazim dalam masyarakat pemburu. Kebiasaan tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk distribusi pangan yang merata. Namun demikian, kebiasaan tersebut dapat memacu aktivitas kegiatan berburu dan meramu di kalangan kelompok pemburu (Pandupitoyo, 2010).

Resiprositas sebanding menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding. Kecuali itu dalam pertukaran tersebut disertai

pula dengan kapan pertukaran itu berlangsung. Dalam pertukaran ini, masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari pertnernya, namun masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan denganyang akan diterima. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan transaksi bukan sebagai satu unit-unit sosial, melainkan sebagai unit-unit sosial yang otonom (Pandupitoyo, 2010).

Resiprositas sebanding berada di tengah-tengah antara resiprositas umum dengan resiprositas negatif, kalau resiprositas sebanding bergerak ke arah resiprositas umum, maka hubungan sosial yang terjadi mengarah ke hubungan kesetiakawanan dan ke arah hubungan yang lebih intim, sebaliknya kalau bergerak ke arah resiprositas negatif maka hubungan sosial yang terjadi bersifat tidak setia kawan yakni masing-masing pihak mencoba untuk mengambil keuntungan dari lawannya (Pandupitoyo, 2010).

Resiprositas negatif, transformasi ekonomi di bidang system pertukaran yang terjadi dinegara berkembang merupakan suatu proses yang terus berjalan. Proses ini sementara menggambarkan dua pola besar. Pertama, hilangnya bentuk-bentuk pertukaran tradisional diganti oleh bentuk pertukaran modern. Kedua, adalah munculnya dualisme pertukaran. Dengan berkembangnya uang sebagaia alat ukar, maka barang dan jasa akan kehilangan nilsi simbolik yang luas dan beragam maknanya karena uang dapat berfungsi memberikan nilai standart obyektif terhadap barang dan jasa yang dipertukarkan. Hal inilah yang disebut negatif, karena dapat menghilangkan suatu tatanan pertukaran yang telahada. Tingkat gotong royongpun sekarang semakin berkurang karena

kegiatan masyarakat yang semakin *money oriented* membuat nilai-nilai keikhlasan untuk saling membantupun berkurang (Pandupitoyo, 2010).

2.1.4 Konsep Marginalisasi

Menurut Horton (1993) dalam Putra (2011) menyebutkan marginal sebagai keadaan menjadi sebuah bagian suatu budaya atau masyarakat yang tidak utuh. Definisi ini lebih menekankan pada sudut pandang sosial budaya, yang mana sebuah kelompok terpinggirkan karena kondisi budaya yang belum terinternalisasi secara utuh. Termarginalkan atau terpinggirkan juga merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang karena sesuatu sebab tertentu seperti akibat norma sosial ekonomi tertentu, hubungan ekonomi, keterpencilan geografis, perbedaan budaya dan lain-lain menjadi terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.

Adapun menurut Pablo Gonzales Casanova dalam Kurnia (2011), marginalisasi adalah fenomena pedesaan yang menimbulkan kemelaratan dan ciri kebudayaan pribumi tertentu yang biasanya tertahan yang menunjukkan fenomena integral dalam masyarakat artinya peminggiran oleh sekelompok orang.

Pada khasanah ilmu sosial, ada beberapa definisi dan penjelasan teoritis mengenai marginalisasi. Menurut Mullaly (2007) dalam Kurnia (2011), marginalisasi merupakan sebuah proses sosial yang membuat masyarakat menjadi marginal, baik terjadi secara alamiah maupun dikreasikan sehingga masyarakat memiliki kedudukan sosial yang terpinggirkan.

Marginalisasi memiliki atau mempunyai aspek terkait pada bidang sosiologi, ekonomi dan politik. Adapun dimana marginalisasi sebenarnya telah memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang sangat familiar di mata penduduk di dunia ini, misalnya budaya, struktur keluarga hingga spektrum yang negatif pada masyarakat (*Opini Power*). Menurut Aditya Anupkumar (2009) dalam Hardin (2011)

“Marginalisasi merupakan sebuah proses sosial untuk menjadi terpinggirkan, tersudutkan, terjadinya kesenjangan ekonomi dan terintermidasinya sebuah kelompok dalam masyarakat ketentuan marginalisasi sesungguhnya dapat di deskripsikan sebagai reaksi yang berlebihan atau kecenderungan dari sosial masyarakat yang menjadi tidak berfungsi dari sistem yang lazim dari bentuk perlindungan dan pengintegrasian, yang bertujuan untuk membatasi kesempatan untuk bertahan hidup dengan baik (Hardin, 2011).”

Adapun kesimpulan dari penjelasan mengenai konsep marginalisasi di atas yang dimaksud dengan marginalisasi makna gotong royong merupakan sebuah proses sosial yang membuat makna solidaritas kekerabatan dalam gotong royong menjadi terpinggirkan, baik terjadi secara alami maupun dikreasikan oleh masyarakat.

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Makna Gotong Royong Termarginalisasi

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sebuah kegiatan gotong royong mengalami marginalisasi diakibatkan oleh adanya perubahan sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor, diantaranya:

1. Perubahan Penduduk

Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, namun juga bisa karena adanya perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Transmigrasi dan urbanisasi dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk daerah yang dituju, serta berkurangnya jumlah penduduk daerah yang ditinggalkan. Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya berbagai profesi dan kelas sosial (Alfin, 2010).

2. Penemuan-Penemuan Baru

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat meliputi proses *discovery*, *invention*, dan inovasi.

- a. *Discovery* , yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur baru itu dapat berupa alat-alat baru ataupun ide ide baru.
- b. *Invention*, yaitu bentuk pengembangan dari suatu *discovery*, sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. *Discovery* baru menjadi *invention*

apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru ini dalam kehidupan nyata di masyarakat.

- c. Inovasi atau proses pembaruan, yaitu proses panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru serta jalannya unsur baru dari diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh sebagian besar warga masyarakat (Alfin, 2010).

Suatu penemuan baru, baik kebudayaan rohaniah (imaterial) maupun jasmaniah (material) mempunyai pengaruh bermacam-macam. Biasanya pengaruh itu mempunyai pola sebagai berikut.

1. Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang tertentu, namun akibatnya memancar ke bidang lainnya. Adapun contohnya yaitu penemuan *handphone* yang menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, dan lain-lain.
2. Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan yang menjalar dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Adapun contohnya yaitu penemuan internet yang membawa akibat pada perubahan terhadap pengetahuan, pola pikir, dan tindakan masyarakat (Alfin, 2010).
- 3. Apabila terjadi hubungan primer, maka akan terjadi pengaruh timbal balik atau saling mempengaruhi.**
- 4. Apabila kontak kebudayaan terjadi melalui sarana komunikasi massa (*massmedia*), seperti radio, TV, film, surat kabar atau**

majalah, yang terjadi adalah pengaruh sepihak, yaitu pengaruh dari masyarakat yang menguasai sarana komunikasi massa tersebut.

2.2 Konsep Interaksi Simbolik Gotong Royong Pada Masyarakat Jawa Perantau

Pada tanggal 1 juni 1945 Bung Karno dalam pidatonya mengenai dasar negara pada sidang BPUPKI ternyata tidak hanya menawarkan kelima sila yang kini menjadi dasar Negara diantaranya adalah (1) kebangsaan, (2) internasionalisme, (3) mufakat, (4) kesejahteraan dan (5) ketuhanan, dan lima bilangan tersebut dinamakan Pancasila, namun beliau juga merangkumnya untuk memberikan alternatif untuk peserta sidang yang tidak menyukai bilangan lima. Sehingga Bung Karno memeras kelima sila tersebut menjadi Tri Sila bahkan bisa dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila :

“...Atau barang kali ada saudara - saudara yang tidak suka bilangan lima itu? saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara - saudara Tanya pada saya apakah “perasaan” yang tiga itu? Berpuluh – puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar – dasarnya Indonesia Merdeka/ Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, Kebangsaan dan internasionalisme, Kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu : itulah yang dahulu saya namakan socio – nationalism...”

“...Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tapi politiek-economische democratie, yaitu politieke – democratie dengan socialerechtvaardigheid : inilah yang dahulu saya namakan socio-democratie...”

“...Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain.jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga :socio-nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan.kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini.tetapi barang kali tidak semua tuan – tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu.Apakah yang satu itu?...”

“...Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia,yang kita semua harus mendukungnya. semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia,bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia-semua buat semua!. Jikalau saya peras kelima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong – royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong – royong”(Penaaksi, 2011).

Dasar dari semua sila Pancasila adalah gotong-royong. Maknanya adalah:

- a. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran; bukan ketuhanan yang saling menyerang, merusak dan mengucilkan.
- b. Prinsip intenasionalismenya harus berjiwa gotong-royong, yakni yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan; bukan menjajah dan eksploitatif.
- c. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong yakni mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “bhineka tunggal ika”; bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan.
- d. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi).
- e. Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan); bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme; bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme , yaitu suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan (Sudarsa, 2011).

Dari kutipan pidato bung Karno sangatlah jelas dasar dari kesemua sila tersebut adalah sifat gotong royong . Jiwa gotong royong sudah sangat mendarah daging dalam diri masyarakat Indonesia.kita harus menjiwai kelima sila yang menjadi dasar negara saat ini dengan jiwa gotong – royong.

Memahami “Ke-Tuhanan yang Maha Esa” dengan jiwa gotong – royong. bukan ke-Tuhanan yang saling menyerang atau menjatuhkan. Bukan kemanusiaan yang bandel dan biadab.bukan persekutuan Indonesia.bukan juga keadilan sosial yang memihak.

Sekali lagi perlu dipahami bahwa jiwa gotong – royong haruslah ada dalam setiap diri rakyat Indonesia. Adapun karena ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam memaknai nilai-nilai Pancasila, dikarenakan gotong – royong merupakan jati diri bangsa Indonesia yang murni. Sehingga diperlukan sesuatu yang murni untuk membangun negara yang mandiri dan kuat pada era globalisasi.

Gotong royong merupakan paham dinamis, maksud dari paham dinamis adalah paham kekeluargaan dalam kebersamaan untuk membangun Indonesia yang lebih maju berdasar landasan dasar Negara yaitu pancasila. Gotong royong, menurut Harjono (2011), telah tumbuh dan berkembang dalam diri masyarakat Indonesia, dan Pancasila bukan merupakan pandangan hidup yang diimpor dari luar.

”..pancasila atau gotong royong tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh berkembangnya bangsa Indonesia”.

Budaya gotong royong pada masyarakat Jawa, tidak hanya dimaknai sekedar saling bantu-membantu antar-sesama, lebih dari itu juga bahwa gotong royong dimaknai sebagai kegiatan warisan dari nenek moyang yang harus dipertahankan.

Terkait hal tersebut, masyarakat Jawa dalam membangun hubungan sosial selalu mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu tanpa membandingkan dari segi apapun, baik suku dan agama. Demikian yang melatarbelakangi masyarakat Jawa menjadikan budaya gotong royong sebagai simbol dalam kehidupan bermasyarakat (Harjono, 2011).

Menurut keberadaan kegiatan gotong royong pada masyarakat Jawa telah dijadikan sebagai budaya oleh masyarakat Jawa dengan makna simbolik diantaranya menjadikan hubungan kekerabatan antar warga menjadi lebih erat. Pada ilmu antropologi, kajian tentang makna digawangi oleh paradigma antropologi simbolik. Simbol selalu berkaitan dengan makna, karena pada dasarnya paradigma simbol mempelajari signifikansi makna bagi kehidupan manusia.

Geertz (1992) dalam Prasetijo (2008) secara jelas mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya; suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap-sikapnya ke arah kehidupan; suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomatik. Adapun alasannya karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, maka proses budaya haruslah dibaca, diterjemahkan, dan diinterpretasikan.

Geertz (1992) memfokuskan konsep kebudayaan kepada nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Sehingga pada akhirnya konsep budaya lebih sebagai pedoman penilaian terhadap gejala-gejala yang dipahami oleh si pelaku kebudayaan tersebut. Makna berisi penilaian-penilaian pelaku yang ada dalam kebudayaan tersebut. Adapun dalam kebudayaan, makna tidak bersifat individual tetapi publik, ketika sistem makna kemudian menjadi milik kolektif dari suatu kelompok. Kebudayaan menjadi suatu pola makna yang diteruskan secara historis terwujud dalam simbol-simbol. Kebudayaan juga menjadi suatu sistem konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan (Geertz, 1992:3).

2.3 Tinjauan Masyarakat Jawa

Suku Jawa adalah suku bangsa yang terbesar di Indonesia, dengan jumlahnya di sekitar 90 juta. Mereka berasal dari pulau Jawa dan menghuni khususnya di provinsi Jawa Tengah serta Jawa Timur tetapi terdapat juga di provinsi Jawa Barat, Banten dan di Jakarta (Apvalentine, 2010).

Adapun sebagian besar suku bangsa Jawa menuturkan bahasa Jawa sebagai bahasa percakapan harian. Sebuah tinjauan pendapat yang dijalankan oleh Majalah Tempo pada awal dekade 1990-an menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% daripada orang-orang Jawa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertuturan harian. Sekitar 18% menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa

Indonesia, dengan yang lain menuturkan bahasa Jawa sebagai bahasa utama mereka (Apvalentine, 2010).

Menurut konsepsi orang Jawa mengenai pelapisan sosial dalam masyarakatnya, penduduk desa termasuk lapisan paling rendah, lapisan *wong cilik*, atau “orang kecil”. Adapun *wong cilik* di kota-kota adalah mereka yang melakukan pekerjaan tangan dan pertukangan. Mereka yang menganggap diri mereka termasuk lapisan masyarakat yang lebih tinggi adalah golongan pegawai atau *priyayi* (Koentjaraningrat, 1984:279).

Suatu pembagian lain dari masyarakat Jawa, berbeda daripada perbedaan menurut lapisan-lapisan, adalah pembagian vertikal ke dalam *abangan* dan *santri*. *Abangan* adalah orang-orang yang tidak mentaati pelajaran-pelajaran agama Islam, terutama mengenai *salat* lima kali sehari, berpuasa dalam bulan Puasa, dan memakan makanan yang diharamkan. *Santri* adalah orang-orang yang taat menuruti pelajaran Islam. Adapun pengecualian perbedaan lahir mengenai ketaatan kepada pelajaran-pelajaran agama Islam tersebut di atas, perbedaan antara *abangan* dan *santri* terletak juga kepada hal-hal yang lebih mendalam, ialah kepada perbedaan dalam hal gaya hidup dan pandangan hidup (Koentjaraningrat, 1984:279).

Menurut Geertz (1992) dalam Sentosa (2010) pembagian masyarakat yang ditelitinya ke dalam tiga tipe budaya ini didasarkan atas perbedaan pandangan hidup di antara masyarakat Jawa. Subtradisi *abangan* yang menurut Geertz (1992) dalam Sentosa (2010) diwarnai berbagai upacara selamatan, praktik pengobatan tradisional, serta kepercayaan kepada makhluk halus dan kekuatan gaib itu terkait

pada kehidupan di pedesaan. Subtradisi *santri* yang ditandai oleh ketaatan pada ajaran agama Islam serta keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial dan politik yang bernafaskan Islam dijumpai di kalangan pengusaha yang banyak bergerak di pasar maupun di desa selaku pemuka agama. Subtradisi ketiga, *priayi*, ditandai pengaruh mistik Hindu-Budha prokolonial maupun pengaruh kebudayaan Barat dan dijumpai pada kelompok elite kerah putih (*white collar elite*) yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah. Adapun dengan demikian Geertz (1992) dalam Sentosa (2010) melihat adanya keterkaitan erat antara ketiga subtradisi ini *abangan*, *santri*, dan *priayi* dengan tiga lingkungan desa, pasar, dan birokrasi pemerintahan.

Perkampungan masyarakat Jawa pun mempunyai keunikan tersendiri, dengan bentuk rumah desa yang berbentuk persegi yang berukuran kira-kira empat kali lima meter. Rangka rumah terdiri atas suatu sistem tiang-tiang kayu beserta alat-alat penahannya, tembok-temboknya adalah bidang –bidang anyaman bambu, dan atapnya adalah lapisan-lapisan daun kelapa kering, yang diikat dengan tali temali bambu pada kerangka atap. Bagian dalam rumah terdiri atas bagian-bagian kecil, yang masing-masing dipisahkan oleh dinding-dinding bambu yang dapat dipindahkan. Pintu-pintunya adalah pintu seret; jendela-jendela tidak ada dan sinar matahari masuk melalui lubang-lubang besar di bagian atas dari dinding-dinding samping (Koentjaraningrat, 1984:281).

Pada kehidupan masyarakat Jawa sangat beragam, seperti pada kebiasaan sehari-hari masyarakat Jawa yang bekerja sebagai petani. Sesuatu hal yang sangat diinginkan oleh keluarga tani Jawa, ialah keadaan selamat, yaitu keadaan aman tenteram, dengan tidak ada kejadian-kejadian yang mengganggu ketenteraman

tersebut. Keadaan tegang seolah-olah menarik dan mendatangkan bahaya, kecelakaan, penyakit, ataupun maut. Suatu jalan yang sangat penting untuk mengatasi rasa takut akan bencana-bencana tersebut adalah jalan berlaku *prihatin*. Keadaan prihatin dapat dikuatkan dengan memperhatikan pantangan –pantangan dan dengan menjalankan upacara-upacara selamatan, yang bertujuan untuk memperoleh keadaan selamat (Koentjaraningrat, 1984:284-285).

Geertz (1992) dalam Koentjaraningrat (1984:285) selamatan merupakan upacara yang utama dalam kehidupan seorang petani Jawa terdiri atas suatu upacara makan makanan suci bersama, yang tergantung kepada pentingnya perayaan, dapat diadakan dengan cara sederhana ataupun dengan sangat luas. Sebuah selamatan yang diselenggarakan oleh suatu rumah tangga, biasanya hanya dihadiri oleh tetangga –tetangga yang paling dekat dan ada juga yang tidak mengundang tamu-tamu sama sekali, akan tetapi mengirimkan makanan kepada para tetangga yang telah didoakan.

Suatu keluarga petani Jawa berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga–tetangga dekat, akan tetapi juga dengan keluarga –keluarga tetangga lainnya. Hubungan baik ini dinyatakan oleh mereka dengan berbagai sistemtolong-menolong. Menurut tatacara Jawa, jiwa tolong-menolong harus dinyatakan dalam berbagai kewajiban terhadap tetangga yang harus diperhatikan oleh setiap kepala keluarga. Seseorang berkewajiban untuk mengundang seorang tetangga pada waktu mengadakan selamatan; pada peristiwa sakit, kecelakaan, dan kematian seseorang wajib memberi pertolongannya (Koentjaraningrat, 1984:292).

Pada peristiwa kematian, semua tetangga berkewajiban untuk mengerjakan semua pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan untuk pemakaman, sehingga keluarga yang sedang berduka tidak perlu memikirkan segalanya. Adapun di samping memberi pertolongan, tetangga-tetangga sering juga menyumbangkan uang bersama-sama untuk meringankan biaya pemakaman, atau memberikan makanan untuk selamatan untuk dihidangkan kepada tamu-tamu. Pertolongan semacam ini biasanya mereka berikan sengan sukarela, dengan tidak mengharapkan apa-apa atas jasa-jasa mereka. Seringkali tetangga memerlukan pertolongan untuk bermacam-macam pekerjaan, antara lain untuk memperbaiki rumah, mengganti dinding bambu, mengusir tikus, dan menggali sumur di kebun serta kegiatan lainnya yang membutuhkan tenaga masyarakat (Koentjaraningrat, 1984:292).

Permintaan untuk pertolongan seperti di atas, apabila dilakukan dengan suatu tatacara yang sopan, yaitu *nyambat*, tidak boleh ditolak. Seorang warga desa yang diminta pertolongannya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan bagi tetangganya, mencatat dalam ingatannya bahwa tetangganya berhutang pekerjaan kepadanya dan hutang pekerjaan semacam ini tidak akan dilupakannya dan akan diperhitungkan dengan seksama (Koentjaraningrat, 1984:293).

2.4 Sejarah Transmigrasi Orang Jawa di Lampung

A. Sejarah Transmigrasi

Sejarah transmigrasi di Indonesia sudah mencapai satu abad, yang dimulai dilaksanakan sekitar tahun 1950 pada masa penjajahan Hindia Belanda. Adapun pada saat itu nama yang digunakan adalah kolonisasi. Pemerintah

hindia Belanda mengadakan kolonisasi ini didasarkan atas semakin meningkatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa dan perlunya tenaga kerja sektor perkebunan di luar Pulau Jawa.

Peningkatan jumlah penduduk di pulau Jawa tersebut menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mencari suatu cara untuk melaksanakan pemindahan penduduk secara besar-besaran dari Pulau Jawa ke pulau lain yang penduduknya masih jarang di Indonesia, dengan efisiensi yang tinggi dan biaya yang dapat ditanggung oleh Negara.

Swasono dan Singarimbun (1986:8) mengungkapkan bahwa,

“ Transmigrasi di jaman kolonial Belanda di mulai sejak pertengahan abad ke-19 yang dikenal dengan Ethiesche Politiek ”.

Belanda mulai membuat percobaan, sebelum program ini dilaksanakan Pemerintah Belanda menugaskan seorang Assisten Resident bernama H.G Heyting untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau yang kurang penduduknya dengan tanah yang belum digarap masih sangat luas (Swasono dan Singarimbun, 1986:8)

H.G Heyting dalam Swasono dan Singarimbun (1986:9) mengusulkan suatu sistem yang akan digunakan dalam kolonisasi kepada pemerintah Belanda, yaitu:

- 1) Membangun desa-desa inti (*kern desa's*) dengan jumlah penduduk 500 KK setiap desa inti.

- 2) Penduduk desa diberi bantuan secukupnya agar tingkat ekonomi mereka menguat, dengan harapan bahwa desa-desa inti itu akan menjadi basis bagi koloni-koloni untuk membuka daerah disekitarnya.

Gagasan dari H.G. Heijting diterima oleh pemerintah Belanda dan pada tahun 1905 transmigrasi dilaksanakan dengan daerah tujuannya Gedong Tataan Lampung. Swasono dan Singarimbun (1986:11) mengemukakan mengenai periode transmigrasi,

“...yaitu terdiri atas periode awal transmigrasi, periode tahun 1927-1930, periode tahun 1930-1935 dan periode sesudah pengakuan kemerdekaan”.

Transmigrasi merupakan salah satu unsur utama rencana pembangunan Indonesia. Tujuan sosial transmigrasi adalah menolong rakyat Indonesia yang termiskin, yaitu petani tanpa lahan, penganggur di kota dan gelandangan. Transmigrasi bertujuan pula untuk membangun daerah luar Jawa, dengan memanfaatkan lahan-lahan luas yang belum diolah, mengubah tanah yang belum digarap menjadi tanah yang lebih produktif (Levang, 2003:7).

Program transmigrasi telah dimulai sejak Indonesia masih dibawah pemerintahan kolonial Belanda yaitu pada Fase Percobaan (1905-1931). Pada masa ini dalam setiap proyek, pemerintah Belanda membangun kelompok inti yang terdiri atas 500 kepala keluarga. Keluarga-keluarga tersebut mendapat jaminan selama satu tahun pertama. Setiap keluarga juga diberi subsidi yang mendorong mereka mendatangkan sanak keluarganya, sehingga memicu migrasi spontan (Levang, 2003:9-10).

Fase Transmigrasi Kedua (1931-1941). Tahun 1931 terjadi krisis pada sektor perkebunan besar yang mengakibatkan ribuan buruh Jawa diberhentikan dari pekerjaannya. Tahun 1905-1941, pemerintah Belanda secara keseluruhan memindahkan sekitar 200 ribu jiwa dari Jawa ke luar Jawa (Levang, 2003:10).

Fase Pemecahan Masalah Pascaperang. Pada fase ini pemimpin Republik Indonesia tetap menerapkan cara dan pola yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tetapi tahun 1947 istilah kolonisasi diganti menjadi transmigrasi dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Sosial. Tahun 1948 urusan transmigrasi dipindahkan dibawah Departemen Dalam Negeri. Kondisi ini terus berlangsung, dan tahun 1983 transmigrasi sepenuhnya dibawah Departemen Transmigrasi (Levang, 2003:11).

Pelita I yang dimulai pada tahun 1969 terutama menciptakan stabilitas nasional. Tujuan utamanya adalah mencapai swasembada beras yang berarti meningkatkan produksi sebesar 50% dalam jangka waktu lima tahun. Untuk mencapai hal itu, para perencana dapat menempuh dua jalur, yakni:

1. Intensifikasi pembudidayaan padi, berkat program Revolusi Hijau;
2. Perluasan lahan garapan, berkat program transmigrasi (Levang, 2003:12).

Pelaksanaan kedua Pelita pertama ditandai oleh pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Di Lingkungan aparaturnegara, korps insinyur dari Departemen Pekerjaan Umum yang sangat terstruktur memegang peran yang sangat menentukan. Ambisi dari insinyur tersebut adalah menyulap dataran rendah Sumatra dan Kalimantan menjadi lumbung padi (Levang, 2003:12).

Pelita III dan IV merupakan masa target. Pada Pelita III (1979-1984), pemerintah memutuskan untuk membagi tugas kepada departemen-departemen terkait. Departemen pekerjaan umum bertugas mempersiapkan lokasi, departemen transmigrasi bertugas merekrut, memindahkan, dan membina para transmigran. Departemen pertanian mengurus masalah pertanian, departemen agama mengurus masalah tempat ibadah dan departemen kesehatan mengurus masalah puskesmas. Untuk memecahkan masalah koordinasi antar dinas dari departemen-departemen tersebut, maka pemerintah menciptakan instansi baru yang dinamakan Badan Koordinasi Transmigrasi (Bakortrans). Pada Pelita IV (1984-1989), pemerintah memindahkan 750 ribu kepala keluarga. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena lama kelamaan penduduk asli menjadi minoritas di daerahnya sendiri (Levang, 2003:13).

Pada Pelita V kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi ditangani oleh satu departemen yaitu departemen transmigrasi. Pola usaha pertanian tetap dilanjutkan, tetapi lebih ditingkatkan pada pola-pola perkebunan, perikanan, dan perindustrian. Pada Pelita VI, kebijaksanaan pembangunan transmigrasi diarahkan pada kawasan Indonesia Timur, mendukung pembangunan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan menggalakkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

B. Transmigrasi

Transmigrasi dalam bahasa latin yaitu *transmigrates*, dalam bahasa Inggris menjadi *transmigration* yang artinya perpindahan. Kata transmigrasi sendiri

kemudian diadaptasi di Indonesia atas jasa Bung Karno dan Bung Hatta. Beliau menggunakan kata tersebut, sebagai cara pengertian kepada masyarakat mengenai program pemerintah memindahkan penduduk melewati laut, atau dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya.

Transmigrasi menurut bahasa berasal dari dua kata, *trans* dan *migrasi*. Kata *trans* berarti pindah atau perpindahan dan *migrasi* adalah perpindahan penduduk. Adapun dengan kata lain transmigrasi adalah perpindahan atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam hal ini perpindahan dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Menurut UU Nomor 2 tahun 1972 transmigrasi adalah perpindahan penduduk atau perpindahan dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain, yang ditetapkan dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan Negara atas alasan yang dianggap perlu oleh pemerintah. Adapun secara mendasar pengertian transmigrasi tetaplah sama, yaitu memindahkan penduduk dari sebuah pulau ke pulau lain dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, program pemindahan penduduk tersebut difasilitasi dan dibiayai oleh Negara.

Transmigrasi diyakini sebagai salah satu solusi bagi masalah peningkatan jumlah penduduk khususnya di Pulau Jawa, Bali dan Lombok. Pada situasi di tengah-tengah krisis ekonomi dan meningkatnya pengangguran, kebutuhan untuk memindahkan penduduk menjadi lebih besar dari sebelumnya karena kelangkaan lapangan kerja, kemiskinan meningkat, dan adanya urbanisasi. Terkait kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang

transmigrasi dan menjadi dasar transmigrasi di Indonesia menurut keputusan menteri transmigrasi Republik Indonesia (RI) tahun 1984 tentang ketransmigrasian bahwa yang disebut transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman.

Terdapat bermacam-macam transmigrasi yang dikenal di Indonesia. Berdasarkan jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah, transmigrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya :

1. Transmigrasi Umum

Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang pembiayaannya dari pemberangkatan sampai penempatan dalam jangka waktu tertentu biaya sebagian besar ditanggung oleh pemerintah pusat.

2. Transmigrasi Swakarya

Transmigrasi swakarya adalah transmigrasi yang diselenggarakan oleh departemen transmigrasi dengan jaminan hidup beberapa tahun, selanjutnya diberikan tanah kepada transmigran untuk dikerjakan.

3. Transmigrasi Swakarsa atau Spontan

Transmigrasi swakarsa atau spontan adalah transmigrasi yang diselenggarakan atas biaya sendiri dengan bimbingan dan fasilitas dari pemerintah. Tipe transmigrasi swakarsa/ spontan adalah transmigrasi yang

dilaksanakan atas dasar dorongan sendiri dengan kemauan sendiri. Tipe transmigrasi swakarsa adalah sebagai berikut:

- a. Transmigrasi swakarsa/spontan dilaksanakan oleh pemerintah terdiri atas:
 - 1) Transmigrasi swakarsa/spontan DBB (Dengan Bantuan Biaya).
 - 2) Transmigrasi swakarsa/spontan TBB (Tanpa Bantuan Biaya) yaitu transmigrasi swakarsa/spontan atas dasar sendiri tanpa bantuan dari pemerintah tetapi memperoleh pembinaan dan pengawasan.
 - b. Transmigrasi swakarsa/spontan murni yaitu transmigrasi spontan di luar kontrol pemerintah.
4. Transmigrasi Keluarga

Transmigrasi keluarga adalah transmigrasi yang pembiayaannya ditanggung oleh keluarga yang telah berada di daerah transmigrasi. Transmigrasi ini dilakukan atas dasar kemauan sendiri oleh pihak keluarga yang sudah terlebih dahulu menempati daerah transmigrasi. Orang-orang yang dipindahkan merupakan kerabat dari transmigran yang berada di daerah transmigrasi. Transmigrasi keluarga dilaksanakan jika keluarga yang terlebih dahulu menempati daerah transmigrasi telah sukses di daerah tersebut.

5. Transmigrasi lokal

Transmigrasi lokal adalah transmigrasi dari suatu Provinsi lain, dan biaya ditanggung oleh departemen transmigrasi. Berbeda dengan transmigrasi umum, transmigrasi lokal seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah daerah baik daerah asal maupun daerah yang menjadi tujuan transmigrasi dan bekerjasama dengan departemen transmigrasi.

6. Transmigrasi Sektoral

Transmigrasi sektoral adalah transmigrasi yang pembiayaan diurus bersama-sama, sedangkan transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi seluruh penduduk dari sebuah desa beserta aparatur pemerintahannya, karena desa tersebut terkena rencana proyek pemerintah (Ilmi, 2010).

C. Motivasi dan Tujuan Transmigran

Adapun untuk sebagian kecil transmigran, ikut bertransmigrasi berarti paling tidak terjamin perumahan dan pangan selama dua belas bulan. Jaminan hidup sepenuhnya (beras, ikan asin, garam, gula, minyak goreng, selain itu juga minyak lampu dan sabun) yang disetujui Departemen Transmigrasi (Deptrans) selama dua belas sampai delapan belas bulan sesuai dengan jenis proyeknya, cukup untuk menarik minat sejumlah calon (Levang, 2003:66).

Sebagian besar transmigran mengejar taraf hidup yang lebih tinggi daripada sekadar mempertahankan hidup dari hari ke hari. Hampir semua transmigran memiliki semangat untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonominya dari

kegiatan usaha tani. Hampir semuanya ingin menetap selamanya di daerah tujuan. Tidak seorang pun berangan-angan dapat memperkaya diri dengan cepat dari kegiatan usaha tani (Levang, 2003:67).

Adapun demikian, tidaklah akan mengherankan bahwa menjadi pemilik tanah dan menjamin masa depan anak merupakan motivasi yang paling sering dinyatakan oleh transmigran. Meskipun demikian, masa depan anak yang menjadi pikiran banyak transmigran, tidak selalu dibidang pertanian. Memperoleh hak milik tanah bukan merupakan tujuannya, tetapi cenderung merupakan sarana penjamin pendidikan yang baik bagi anak-anak transmigran. Jika perlu, petani tidak segan - segan menjual tanah warisannya agar anaknya dapat diterima menjadi pegawai negeri (Levang, 2003:67-68).

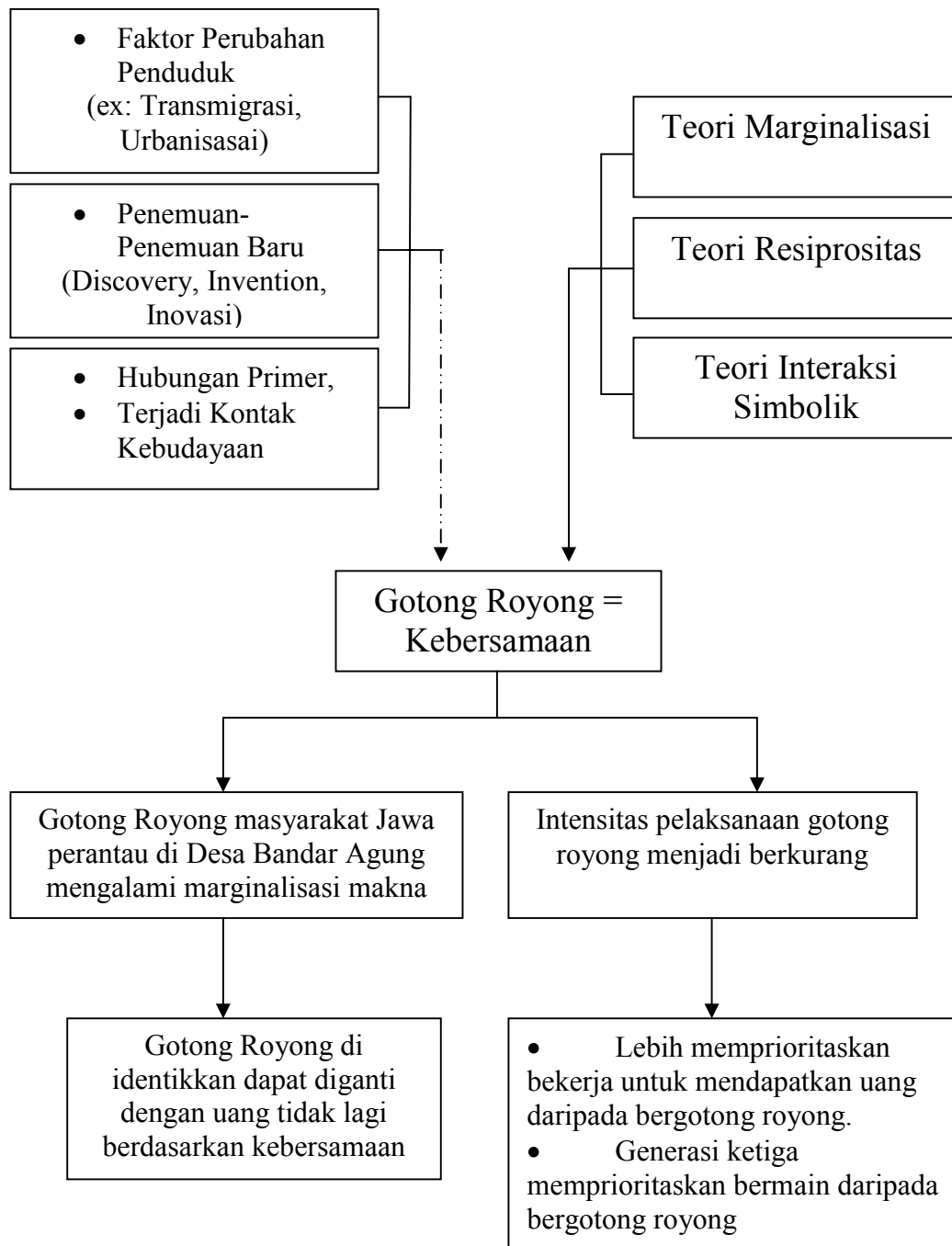
“Kehilangan muka” juga merupakan alasan untuk bertransmigrasi. Hal itu disebabkan oleh terbongkarnya pengelolaan keuangan yang meragukan, kalah judi dalam jumlah besar, atau dapat pula disebabkan oleh masalah rumah tangga. Bagi mereka yang “kehilangan muka”, transmigrasi merupakan satu-satunya kesempatan untuk membangun hidup baru, satu-satunya alternatif untuk membebaskan diri dari pengucilan (Levang, 2003:68).

2.5 Kerangka Pikir

Gotong royong royong memiliki pengertian bahwa setiap individu dalam kondisi seperti apapun harus ada kemauan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap obyek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak disekeliling hidupnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, ketrampilan atau *skill*, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan.

Masyarakat Jawa yang menjadi transmigran di Desa Bandar Agung, menjalankan kehidupan dengan gotong royong satu sama lain. Akan tetapi seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mengakibatkan gotong royong dalam masyarakat Bandar Agung menjadi termarginalkan atau terpinggirkan.

Bagan 1. Skema Kerangka Pikir



Keterangan :

---> : Masuknya Faktor-Faktor

—> : Marginalisasi/Proses Peminggiran